

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Swasta dalam Pengelolaan *E-government* Tahun 2016

Collaborative Governance antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institutional* berjalan pada awal 2013, kolaborasi ini berawal ketika salah satu desa di Kabupaten Bantul mempunyai mitra kerja dengan *Combine Resource Institutional*, awal mula bisa terciptanya suatu program dalam kolaborasi ini yaitu pasca terjadinya bencana alam, dimana desa memiliki impian untuk mempunyai sebuah data yang bisa di dapat kapanpun dan bisa diakses dimanapun.

Dalam perjalanannya menuju proses kolaborasi ini termasuk *bottom-up*, kolaborasi dengan swasta terjadi karena keinginan masyarakat desa yang sudah memiliki inovasi dan dibuatkan program dengan bantuan dari *Combine Resource Institutional* hal ini ingin disepakati oleh pemerintah kabupaten yang bertujuan supaya program bisa berjalan dengan lancar. *Collaborative Governance* antara pemkab dan swasta ini mempunyai tujuan untuk mendukung suatu program yang diusung langsung oleh beberapa desa yang tertarik dalam program Sistem Informasi Desa.

Dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pihak-pihak yang terlibat ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, *Combine Resource Institution*, serta seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.

Adapun peran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk mendukung program Sistem Informasi Desa dimana Pemkab memberikan fasilitas seperti tower untuk bisa mengakses internet dengan mudah serta memberikkan *wifi* untuk melancarkan program diseluruh desa di Kabupaten Bantul, selain itu Pemkab memberikan pelatihan untuk pemerintah desa yang bekerjasama dengan *Combine Resource Institution*, peran *Combine Resource institution* ini adalah untuk menjembatani kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan program Sistem Informasi Desa dimana memberkan pelatihan program serta memberikan arahan mengenai teknik penggunaan serta pemanfaataan dan memberikan pembaharuan sistem untuk program Sistem Informasi Desa. Untuk peran pemerintah desa di 75 desa di Kabupaten Bantul ini adalah sebagai objek dari program yang memanfaatkan program Sistem Informasi Desa, dimana untuk memanfaatkan penggunaan *e-government*, serta untuk mengsucceskan Bantul *Smart City* pada tahun 2019.

Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo merupakan desa yang mengimplementasikan program Sistem Informasi Desa dimana diperintahkan oleh pemkab, bukan termasuk dari salah satu desa yang tertarik akan program ini. Tetapi meskipun seperti itu Desa Jatimulyo mengimplementasikannya sesuai dengan aturan dari pemkab meskipun memiliki beberapa kendala yang terjadi dalam menjalankan program ini. Kendala yang terjadi bermacam-macam salah satunya adalah karena sumber

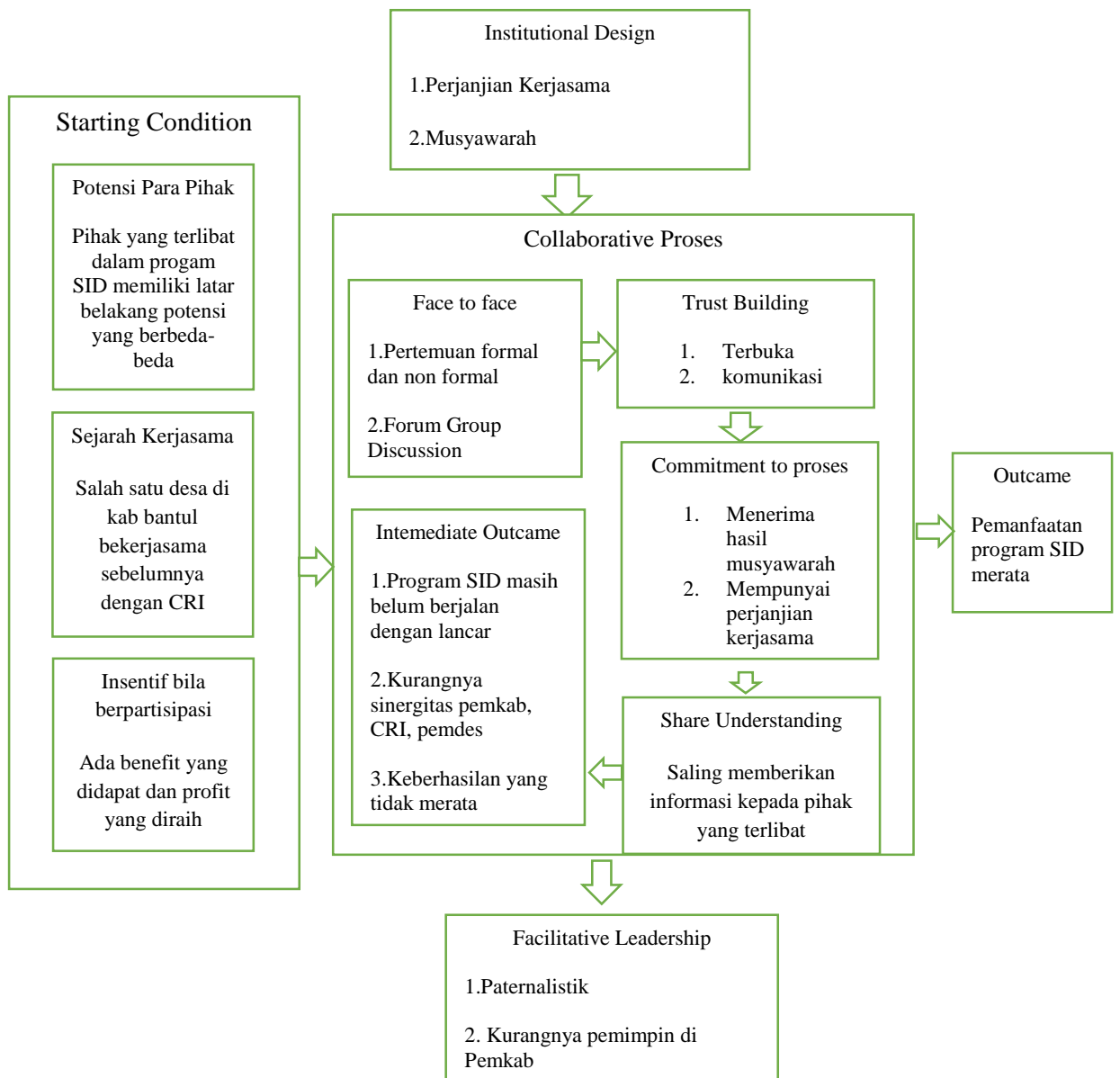
daya manusia yang masih belum tertarik teknologi dan belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang memakai teknologi informasi dan komunikasi dalam pendataan, pelayanan dan lain-lain.

Proses kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dengan *Combine Resource Institutional* dapat dilihat dari model kolaborasi. Dalam model kolaborasi ini akan menjelaskan kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institutional, dan proses kolaborasi. Dalam kolaborasi setiap aktor yang terlibat menjalankan kolaborasi ini atas dasar demokrasi yang terwujud dalam suatu musyawarah dengan kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Swasta dalam Pengelolaan *E-government* dapat dilihat dari penjelasan dalam bab ini.

Gambar 3.1

Model *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resouce Institution* di Desa Jatimuyo



Sumber : data diolah oleh peneliti, 2017

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap ini menjelaskan kondisi awal keadaan pertama kali desa bisa membuat inovasi dalam pemanfaatan *e-government*, seperti yang telah dikemukakan oleh (Hartono dan Mulyato, 2010) *Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan *e-Government* menentukan prioritas pengembangan *e-Government* suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Citizen* (G2C). Maka dari itu ada beberapa pihak yang terkait memiliki pemikiran atau tujuan yang berbeda-beda, dimana dari perbedaan pemikiran tersebut dapat menimbulkan konflik atau pendapat yang berbeda.

Awal mula adanya program Sistem Informasi Desa yaitu dari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 baru mulai untuk membuat system untuk program tetapi awal mula terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* pada tahun 2013, inovasi program ini tidak sengaja muncul ketika perangkat desa menyadari bahwa adanya bencana

alam bisa merusak dan memusnahkan dokumen-dokumen dalam waktu yang cepat.

Kejadian yang telah dialami masyarakat Yogyakarta pada tahun 2006 dimana terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang sangat dahsyat, selain bangunan yang roboh pun dokumen, arsip lainnya menjadi musnah. Dari sanalah perangkat desa bermimpi memiliki system *barcode* model supermarket dan rumah sakit dalam artian desa ingin memiliki program seperti rumah sakit dan supermarket dimana data dari perangkat lunak yang akan menyimpan data-data kita secara otomatis dan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan data desa lebih efektif dan tidak akan rusak karena bencana alam, selain karena bencana menurut bapak M.Amrun sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution* menyatakan bahwa :

“Fungsi SID itu sangat banyak salah satunya yaitu tata kelola data, yang kedua untuk keterbukaan informasi public, yang ketiga untuk pelayanan dalam artian setelah mempunyai SID dapat melakukan pelayanan public kepada warganya lebih cepat, baik warga temen-teme lembaga lain, juga pemerintah di atasnya, yang keempat desa bisa memiliki perencanaan yang sesuai dengan data real yang mereka miliki” (Senin, 13 November 2017)

Menurut pernyataan di atas bahwa ada beberapa fungsi Sistem Informasi Desa yang bermanfaat yaitu tata kelola data, keterbukaan informasi publik, pelayanan, memiliki perencanaan sesuai dengan real data yang dimiliki. Keinginan masyarakat ini kemudian disampaikan kepada bapak lurah kepada *Combine Resource Institution*. Pada saat bersamaan *Combine Resource Institution* sedang mengarap radio komunitas di desa

tersebut. Dengan demikian inovasi ini berasal dari masyarakat yang didukung oleh perangkat desa dan di fasilitasi oleh *Combine Resource Institution*, dalam program ini *Combine Resource Institution* berperan sebagai fasilitator untuk mewujudkan harapan dari desa seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh M. Amrun, (2017) sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution*.

Setelah di implementasikan di desa tersebut program Sistem Informasi Desa banyak diminati oleh desa-desa lainnya, karena hal itu setiap desa yang tertarik dalam program Sistem Informasi Desa mengajukan kepada Pemkab Bantul untuk bisa mengikuti pelatihan. Karena semakin banyak desa yang mengajukan, Pemkab melalui Kantor Pengelolaan Data Telematika Bantul melakukan MOU (Memorandum Of Understanding) atau perjanjian kerjasama dengan *Combine Resource Institution* yang bertujuan untuk memberikan ruang dalam menjalankan program dengan legal dari Pemkab.

Setelah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, Pemkab serta *Combine Resource Institution* melakukan pelatihan untuk menjalankan program Sistem Informasi Desa, dari tahun 2015 sampai dengan 2017 pelatihan yang dilaksanakan baru tiga kali pelatihan selain pelatihan ada juga pendampingan dari perguruan tinggi dalam bentuk PKL atau KKN untuk mendorong desa dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa.

Desa Jatimulyo mulai menjalankan program Sistem Informasi Desa pada tahun 2016 berawal dari undangan yang diberikan oleh Pemkab melalui Kantor Pengelolaan Data Telematika Bantul dimana undangan ini ditujukan untuk mengenalkan program serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk seluruh desa di Kabupaten Bantul terutama di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo. Tetapi seperti dalam wawancara dengan Ibu Eti, (2017) tidak semua desa bisa mengikuti program Sistem Informasi Desa karena memiliki kendala yang variatif seperti sumber daya manusia yang kurang memahami teknologi informasi, jaringan, infrastruktur sarana prasarana yang dimiliki oleh Desa Jatimulyo.

Pembkab dalam mendukung program ini memberikan fasilitas seperti jaringan, *wifi* tetapi di Desa Jatimulyo tetap memiliki kendala seperti kurangnya komputer untuk mengakses informasi, sumber daya manusia yang sudah dilatih dalam pelatihan Sistem Informasi Desa karena memiliki keterbatasan, serta perangkat desa yang lama untuk mengikuti dan melaksanakan program dengan berbasis teknologi dan informasi masih mengalami kesulitan, selain itu kendala yang terjadi di Desa Jatimulyo dalam program Sistem Informasi Desa adalah staf desa yang mampu menggunakan teknologi informasi sangat terbatas dan kebetulan yang menjadi admin dalam program Sistem Informasi Desa adalah ibu Eti Muryani sebagai staf pemerintah juga merangkap sebagai Tim Pengelolaan Kegiatan, karena hal itulah salah satu kendala program Sistem Informasi Desa belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi awal adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan *Combine Resource Institution* ini adalah dari masyarakat yang berinovasi ingin mempunyai data-data serta dokumen desa bisa disimpan dalam bentuk online yang bisa diakses dimanapun dan tidak akan mengalami kerusakan jika terjadi bencana. Tetapi untuk Desa Jatimulyo sendiri tidak seperti itu karena desa ini dalam mengikuti program Sistem Informasi Desa hanya akan mengikuti arahan dari pemerintah kabupaten saja.

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau lembaga karena untuk mengarahkan anggotanya untuk bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai arahan dari pemimpinnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, selalu memberikan dukungan, bekerjasama, bertanggung jawab, dan bisa membingbing anggotanya dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam kolaborasi ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, *Combine Resource Institution*, Pemerintah Desa. Adapun pihak-pihak yang membantu dalam mendukung serta menjalankan program ini yaitu dari KKN UKDW, dimana sebelum menjalankan programnya KKN melakukan pelatihan dengan *Combine Resource Institution*, PKL, beberapa LSM seperti SAPA turut mengembangkan Sistem Informasi Desa dengan berbagai kepentingan masing-masing.

Pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga berperan sebagai penampung dari anggotanya, serta berusaha bisa memecahkan masalah dengan benar yaitu melakukan musyawarah dan berdiskusi dengan seluruh anggota sampai dengan memiliki keputusan yang dapat dispakati oleh semua pihak, kepemimpinan menjadi hal yang berpengaruh penting dalam program Sistem Informasi Desa karena kemampuan personal setiap pemimpin berpengaruh besar terhadap jalannya suatu proses kolaborasi. Dari hasil wawancara dengan Nuraini Dwiutami, (2017) bagian *E-government* sebagai Pranata Komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul telah menjelaskan bahwa :

“Sejauh ini yang menjadi penanggungjawab dalam program Sistem Informasi Desa belum ada tetapi saat ini masih menjadi tanggungjawab Diskominfo dan telah di diskusikan dengan OPD lainnya yang nantinya akan menjadi penanggungjawab Sistem Informasi Desa yaitu dari Diskominfo, Bapeda, DPPKBPM, Disdukcapil, Administrasi Pemerintah Desa”. (Jumat, 10 November 2017)

Dari pernyataan diatas bahwasanya untuk saat ini penanggungjawab dari program Sistem Informasi Desa masih belum tentu Organisasi Perangkat Daerah Bantul mana yang akan menjadi penanggungjawabnya. Untuk saat ini yang bertanggungjawab masih dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam proses pelaksanaan program Sistem Informasi Desa peran Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebagai fasilitator untuk mendukung program Sistem Informasi Desa dalam program ini karena program Sistem Informasi Desa berawal dari desa (*bottom up*) jadi pemerintah kabupaten bantul mendukung program yang diusung oleh desa. Untuk mendukung program Sistem Informasi Desa Pemerintah kabupaten

memberikan fasilitas berupa *tower* untuk akses internet di 75 Desa di Kabupaten Bantul. Selain itu peran dari *Combine Resource Institution* adalah sebagai pengagas dari program Sistem Informasi Desa dimana *Combine Resource Institution* ini yang mengawali memberikan pengenalan program berbasis teknologi informasi dalam bentuk *online* maupun *offline*. *Combine Resource Institution* juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengaplikasikan program Sistem Informasi Desa ini. Dengan bantuan dari masyarakat seperti karang taruna, ibu PKK, kelompok tani dan sebagainya untuk membantu mendata masyarakat dari mulai jumlah KK, jumlah masyarakat miskin, ibu hamil, jumlah orang yang sudah meninggal, dan lain-lain.

Dalam menjalankan program Sistem Informasi Desa yang berawal dari masyarakat, dan setelah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta pemerintah kabupaten bantul melalui Diskominfo bertanggung jawab dalam melakukan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan bantuan dari *Combine Resource Institution*, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan adalah untuk melatih sumber daya manusia untuk lebih memahami dan bisa mengimplementasikan dengan baik dan bisa konsisten dalam menjalankannya. Karena baru samapai saat ini dari awal mula di implementasikannya program Sistem Informasi Desa baru 16 Desa yang aktif dalam menggunakan program ini tidak termasuk Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo. Seperti yang dikatakan oleh bapak M.Amrun (2017) meskipun Pemkab memberikan pelatihan sampai saat ini

hanya dua kali, untuk beberapa desa yang inisiatif ingin menggunakan dan memperdalam program ini banyak pemeritah desa mendatangi secara mandiri kepada *Combine Resource Institution* tetapi harus memberikan laporan kepada pemkab. Meskipun seperti itu, *Combine Resource Institution* tetap memberikan ruang untuk melakukan pelatihan dengan desa yang ingin maju dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dari pemaparan diatas kepemimpinan fasilitatif atau *facilitatif leadership* ini dalam program Sistem Informasi Desa dari pemerintah kabupaten melalui Diskominfo hasil dari penelitian menyatakan bahwasannya dalam program ini belum ada yang bertanggungjawab, karena pada tahun sebelumnya program Sistem Informasi Desa ini dipegang oleh Kantor Pengolahan Data Telematika, tetapi berbeda pada tahun 2016 sampai saat ini yang akan bertanggungjawab masih belum pasti antara dari Diskominfo, Bapeda, Disdukcapil, DPPKBPMD, Administrasi Pemerintah Desa. Tetapi untuk saat ini program Sistem Informasi Desa masih dipegang sementara oleh Diskominfo.

3. *Institutional Design* (Desain Institutional)

Desain Institusional mengacu pada protocol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi procedural proses kolaboratif. Dalam proses kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dengan *Combine Resource Institution* aturan-aturan dasar tersebut disepakati oleh semua belah pihak yang terkait dalam kolaborasi dalam program Sistem Informasi Desa. Desain institusional ini tidak lepas dari

bentuk organisasi yang jelas dalam pelaku-pelaku kolaborasi yang berkaitan dalam program Sistem Informasi Desa. Dari dibentuknya program Sistem Informasi Desa ini akan mengetahui siapa-siapa saja yang memangku kepentingan dalam pengelolaan program Sistem Informasi Desa.

Para pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu program harus kooperatif dan terbuka untuk menciptakan sinergitas yang baik dalam proses kolaborasi. Pemangku kepentingan juga harus peka terhadap masalah-masalah yang hadir disekitar, dan harus peduli terhadap masalah juga bisa mengatasi dengan bijak agar kolaborasi yang terjalin sukses sesuai target. Selain itu dalam menjalankan kolaborasi ini para pemangku kepentingan harus adil, bijak dan terbuka. Hal tersebut akan lebih mudah untuk mencapai konsesnsus. Pemangku kepentingan ini yaitu dari Pemerintah Kabupaten melalui Diskominfo, Pemerintah Desa, dan *Combine Resourcce Institution*.

Dalam menjalankan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta ini memiliki desain institutional dalam arti memiliki aturan-aturan yang dibuat untuk menjalankan programnya. Dalam proses kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan *Combine Resource Institution* ini memiliki perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Seperti dalam pasal 1 perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk bekerjasama dalam peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong literasi informasi dengan penyadaran potensi dan kapasitas sebagai produsen pengetahuan pengembangan teknologi tepat guna.

Keterbukaan dalam menjalankan program inipun telah diimplementasikan oleh semua actor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini, dimana ketika pemerintah kabupaten melalui Diskominfo mengalami kesulitan atau membutuhkan sumber daya manusia untuk membantu dalam melakukan pelatihan maka dari pihak ketiga ini akan senantiasa membantu untuk mendukung program Sistem Informasi Desa. Dukungan dari pihak swasta inipun berupa tindakan dalam proses bantuan program, peningkatan, pelatihan, dan lain-lain.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Desain Institusional dalam kolaborasi ini mempunyai desain dalam bentuk perjanjian kerjasama dimana dari Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* ini membuat perjanjian kerjasama pada tahun 2015, dimana membuat pasal-pasal mengenai aturan proram Sistem Informasi Desa. Desain Instutusional dalam kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dengan *Combine Resource Institution* ini belum memenuhi syarat untuk Desain Institusional karena sebenarnya selain aturan program seharusnya ada bagaimana forum *Collaborative*

Governance itu di desain, partisipasi berbagai pihak yang terkait, ketika melaksanakan rapat bagaimana kehadiran forum yang datang serta prosesnya terbuka.

Dari hasil penelitian menurut ibu Nuraini Dwi utami, (2017) sebagai Pranata Komputer bagian *E-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul dalam menjalankan program Sistem Informasi Desa pada tahun 2016 belum melaksanakan pertemuan formal bersama *Combine Resource Institution* hanya melaksanakan pertemuan non-formal untuk membahas pengembangan aplikasi, jadi masih belum mengetahui bagaimana forum ketika melaksanakan rapat, partisipasi masyarakat, serta aturan yang jelas. Aturan yang dimiliki sampai saat ini belum diperbaharui masih berpegangteguh pada perjanjian kerjasama pada tahun 2015. Desain Institusional dalam proses kolaborasi ini belum berjalan dengan benar masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan, perlu melakukan aturan-aturan yang jelas agar bisa berjalan dengan baik.

4. Collaborative Proses (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi antara pemerintah Kabupten Bantul dengan *Combine Resource Institution* ini berawal karena desa dan *Combine Resource Institution* mempunyai mitra kerja dengan salah satu desa di Dlingo yaitu desa Terong jauh sebelum bencana alam terjadi di Yogyakarta. Pasca bencana gempa bumi yang dialami masyarakat Yogyakarta yang membuat kerusakan disegala sisi terutama dalam dokumentasi, arsip dan lain-lain. Desa tersebut kebingungan terutama dalam kepemilikan data,

sedangkan aparat desa tidak memiliki data yang suatu saat data itu dapat diperoleh. Desa Terong di Dlingo mempunyai mimpi memiliki *system barkode* seperti supermarket dan rumah sakit dalam arti data yang dimiliki di supermarket dan rumah sakit itu berbasis internet dan bisa dapat digunakan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi. Dalam wawancara dengan bapak Muhamad Amrun sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution* mengatakan bahwa :

“Sebenarnya cita-cita desa ini cukup muluk-muluk cukup tinggi, salah satu cita-cita desa ini yaitu desa ingin dibuat seperti supermarket selain itu juga desa menginginkan seperti rumah sakit, dalam artian desa ini ingin memiliki data seperti rumah sakit yang mengetahui pernah mengunjungi berapa kali dan pernah melakukan *treatment* apa saja” (M.Amrun, Senin 13 November 2017).

Maka dari itu masyarakat desa, karang taruna, dan actor lainnya berdiskusi mengenai keinginan dari masyarakat. Dengan bantuan *Combine Resource Institution*, mimpi yang di inginkan oleh masyarakat desa dapat terwujud dengan gagasan yang bernama Sistem Informasi Desa. Program ini dapat dibuktikan ketika pada tahun 2010 pasca erupsi merapi di Desa Balerante yang berada di Klaten juga sudah menggunakan program Sistem Informasi Desa, ketika kantor desa pindah ke lokasi pengungsian, pemerintah desa sudah bisa mengoprasikan bantuan data dan informasi secara mandiri dengan basis *database* dan *website* desa.

Pada tahun 2012 beberapa pihak sudah mulai berdiskusi mengenai Sistem Informasi Desa tetapi baru di implementasikan pada tahun 2013 karena harus ada persetujuan dari pemkab dan juga membuat perjanjian kerjasama atau MoU agar programnya menjadi legal dan terikat dengan

pihak *Combine Resource Institution* sebagai pemngagas dari program Sistem Informasi Desa. Pada tahun 2013 setelah mempunyai MoU antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* telah diimplementasikan di 75 desa di Kabupaten Bantul salah satunya Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo. Tetapi karena program ini berawal dari desa yang memiliki keinginan untuk menyimpan data berbasis teknologi informasi dan difasilitasi oleh pemkab juga di dampingi oleh *Combine Resource Institution*, serta untuk mengukur keberhasilannya setiap desa sangat berbeda-beda dan tidak merata karena program ini kembali lagi kepada desa, yang menjadi tanggungjawab desa bukan lagi dari pihak pemkab maupun *Combine Resource Institution*. Dalam wawancara dengan Muhamad Amrun selaku Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution* mengatakan bahwa :

“Ini bukan kebutuhan *Combine* juga bukan kebutuhan pemda tetapi ini kebutuhan desa, sekarang kalo desa sudah merasa butuh ada beberapa desa yang secara mandiri mendatangi combine dengan memberi laporan kepada pemkab untuk meminta ijin melakukan pelatihan secara mandiri” (Senin, 13 November 2017)

Meskipun sudah mempunyai perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan swasta, dalam menjalankan program Sistem Informasi Desa ini *Combine Resource Institution* bersifat fleksibel, dimana ketika pemerintah kabupaten ingin memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dengan melibatkan *Combine Resource Institution* maka dari pihak *Combine Resource Institution* pun akan senantiasa memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh Pemkab. Tetapi seperti yang di utarakan oleh M. Amrun,

(2017) selaku Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution* dalam wawancaranya ketika dari pihak *Combine Resource Institution* memiliki kendala tidak bisa mengikuti pelatihan maka akan diwakilkan oleh pemerintah kabupaten melalui Diskominfo dimana akan diberikan materi atau pelatihan yang dibutuhkan.

Desa Jatimulyo mulai menjalankan program Sistem Informasi Desa yaitu karena program ini merupakan program dari pemerintah kabupaten yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 tetapi pada saat itu hanya sebatas pengenalan jika desa sudah bisa menjalankan juga bisa mandiri menjalankannya, tetapi dari pemerintah kabupaten melalui Kantor Pengolahan Data Telematika baru mulai melakukan pelatihan yaitu pada tahun 2016. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Eti Maryani, (2017) sebagai Staf Pemerintah di Desa Jatimulyo bahwa :

“karena tidak semua desa bisa mengikuti program Sistem Informasi Desa karena memiliki beberapa kendala yang variatif salah satunya sumber daya manusia, jaringan serta infrastruktur” (Senin, 06 November 2017)

Setelah adanya pelatihan, Pemkab juga memfasilitasi *tower* untuk akses internet kepada seluruh desa di Kabupaten Bantul, termasuk Desa Jatimulyo yang bertujuan untuk mendukung program Sistem Informasi Desa. Meskipun sudah mengikuti pelatihan dari Pemkab dengan swasta Desa Jatimulyo memiliki beberapa kendala yang terjadi seperti sarana prasarana yaitu komputernya, jaringannya yang susah, sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi informasi karena sumber daya manusia yang dimiliki waktu itu adalah orang terdahulu orang-orang yang

belum melek teknologi. Seperti yang disampaikan oleh ibu Eti Muryani sebagai staf pemerintahan di Desa Jatimulyo dalam wawancaranya yaitu :

“Desa Jatimulyo memiliki kendala itu di stafnya yang sekiranya mampu di IT kan sangat terbatas sekali, kebetulan SIDnya saya sampai sekarang ya masih ‘terseak-seok’ sebenarnya saya, jadi untuk mengikuti SID karena apa, karena keterbatasan waktu karena saya juga disini sebagai TPK sebagai pemerintahan jadi tanggung jawab desa semakin banyak sekali”. (Senin, 06 November 2017)

Melihat dari pemaparan diatas permasalahan tersebut Desa Jatimulyo pada tahun ini berinisiatif akan menambah dua sumber daya manusia khusus untuk program Sistem informasi Desa. Desa Jatimulyo ini akan membagi dua tugas dalam program ini yaitu admin yang akan menginput data dan redaktur yang akan mencari berita di sekitar desa. Meskipun seperti itu menurut ibu Eti (2017) karena kekurangan program ini adalah sumber daya manusia yang kurang memahami teknologi informasi jadi di Desa Jatimulyo memaksimalkan pelayanan yang manual karena Sistem Informasi Desa yang *oflinenya* pun tidak bisa masuk. Selain itu akses jaringan yang dimiliki Desa Jatimulyo kurang baik meskipun sudah difasilitasi *tower* oleh Pemkab, mungkin karena keberadaan Desa Jatimulyo yang berada di wilayah dataran tinggi.

Combine Resource Institutional adalah sebagai pihak ketiga dari program Sistem Informasi Desa yang memberikan pelatihan untuk program Sistem Informasi Desa. Selebihnya untuk mengetahui aktif dan tidaknya program Sistem Informasi Desa yaitu dari Pemerintah Kabupaten melalui Diskominfo. Tetapi kembali lagi seperti awal mula berdirinya program ini

karena inovasi dari desa jadi berjalan atau tidaknya program ini tergantung dari perangkat desa yang memanfaatkan programnya.

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya proses kolaborasi dalam program Sistem Informasi Desa ini belum berjalan secara maksimal dimana kurangnya sinergitas antara Pemkab dengan Pemerintah Desa, juga dengan *Combine Resource Institution*. Dalam melaksanakan pelatihan dari Pemkab dengan juga *Combine Resource Institution* sampai saat ini baru tiga kali melaksanakan pelatihan, belum dilaksanakan secara terjadwal untuk memaksimalkan program Sistem Informasi Desa secara merata di seluruh desa di Kabupten Bantul. Untuk Desa Jatimulyo dalam melaksanakan proses kolaborasi hanya mengikuti arahan dan kebijakan dari Pemkab, dan untuk menjalankan programnya Desa Jatimulyo belum memanfaatkan dengan baik.

Adapun hal-hal yang menjadi acuan dalam proses kolaborasi ini adalah :

a. Dialog tatap muka (*face to face*)

Face to face yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu dialog tatap muka yang berarti tatap wajah atau bertemu langsung atau yang sering disebut dengan berdialog. Berdialog dalam proses kolaborasi ini sangat penting untuk dijalankan, apalagi untuk program Sistem Informasi Desa ini sangat membutuhkan komunikasi yang cukup banyak karena akan banyak berdialog mengenai pelatihan, ataupun hal-hal lain yang berbasis teknologi informasi.

Dalam proses dialog tatap muka ini yang akan selalu berkoordinasi tatap muka bertemu langsung ada dari beberapa pihak, yaitu pemda melalui Diskominfo untuk saat ini karena penanggungjawab masih belum pasti akan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mana, juga dari *Combine Resource Institution*, serta Pemerintah Desa.

Meskipun pemkab dan *Combine Resource Institution* telah memiliki perjanjian kerjasama tetapi tidaklah hanya diantara dua pihak ini yang akan sering berdialog, meskipun akan sering melakukan pertemuan antara pemkab dengan *Combine Resource Institution* dimana ketika pemkab akan membutuhkan info mengenai pembaharuan system atau pun mengalami kesulitan dalam menjalankan program dari kedua belah pihak, dalam kenyataanya bahkan yang sering berdialog dengan *Combine Resource Institution* adalah perangkat desa dimana perangkat desa secara mandiri mendatangi *Combine Resource Institution* untuk melakukan pelatihan dan kepada pemda perangkat desa hanya memberikan laporan ijin untuk pelatihan.

Berbeda untuk Desa Jatimulyo dimana melakukan dialog atau pertemuan langsung dengan pemkab yaitu karena desa ini mendapatkan undangan dari pemkab yang telah disampaikan untuk melakukan pelatihan sekaligus pertemuan langsung antara pihak-pihak yang menjalankan kolaborasi. Sejauh ini Desa Jatimulyo mengikuti arahan dari pemkab, jika pemerintah desa terundang dalam pelatihan maka

akan menghadiri dan seterusnya akan terus mengikuti arahan dan kebijakan dari pemkab.

Dari pemaparan diatas mengenai dialog tatap muka untuk program Sistem Informasi Desa ini pada tahun 2016 menurut ibu Nuraini, (2017) bagian *E-government* di Diskominfo Bantul menyatakan bahwa pada tahun 2016 ini belum ada pertemuan atau berdialog secara formal dengan *Combine Resource Institution* tetapi hanya melakukan pertemuan non-formalnya saja. Pertemuan yang dilaksanakan dengan seluruh desa di Kabupaten Bantul ini hanya saat melaksanakan pelatihan program Sistem Informasi Desa.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan dalam sebuah kolaborasi sangat penting dalam menjalankan sebuah hubungan, terutama dalam menjalankan hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang sama. Kepercayaan terjadi karena dari semua aktor yang terlibat membuat keputusan dan membuat perjanjian bersama dengan visi yang sama.

Dalam kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan swasta ini, kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh semua aktor yang terlibat, hal ini untuk memperlancar program yang akan dilaksanakan bersama. Dalam pelaksanaan program Sistem Informasi Desa tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri, karena dalam kolaborasi mempunyai keterikatan satu pihak dengan yang lainnya karena dalam program ini pemkab tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya bantuan

dari *Combine Resource Institutional*, juga peran pemerintah desa sangat penting untuk mensukseskan program di seluruh Kabupaten Bantul ini.

Pelaku yang terlibat dalam proses kolaborasi ini sudah saling percaya baik antar individu maupun antar instansi atau organisasi. Kepercayaan antar aktor yang terlibat tidak perlu memerlukan waktu yang lama karena dalam menjalankan program Sistem Informasi Desa ini bermula dari masyarakat dan di bantu oleh *Combine Resource Institutional* juga setelah mengetahui manfaat dan hasilnya baik maka pemerintah juga percaya dalam menjalankan program.

Dalam menjalankan program ini membangun kepercayaan antar aktor tidak mempunyai tips dan trik yang khusus agar kepercayaan itu timbul, karena kepercayaan ini timbul dalam individu masing-masing. Kepercayaan ini juga terjadi karena kualitas dari hasil yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta kepada Pemkab dan membuktikan programnya sudah berhasil bisa dimanfaatkan dan layak dipergunakan.

Dalam membangun kepercayaannya desa-desa yang ingin berkembang dan ingin meningkatkan kualitas desa dengan memanfaatkan teknologi informasi berbondong-bondong meminta persetujuan kepada Pemkab melalui Diskominfo untuk meminta pelatihan untuk program Sistem Informasi Desa. Kualitas yang diberikan dari *Combine Resource Institution* pun sudah terbukti bagus untuk pelayanan, pendataan penduduk serta untuk penyimpanan dokumen secara online maupun offline. Maka dalam hal ini aktor-aktor

yang terlibat terutama dari Pemkab setuju dan percaya berkolaborasi bersama *Combine Resource Institution* akan menghasilkan hasil yang baik. Kualitas kerja *Combine Resource Institution* dalam program Sistem Informasi Desa sebagai pengagas program itu sejauh ini sangat baik, terbukti sampai sekarang dari pihak *Combine Resource Institution* selalu memberikan pembaharuan baru untuk program Sistem Informasi Desa, juga selalu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.

Sejauh ini untuk Desa Jatimulyo membangun kepercayaan untuk program Sistem Informasi Desa adalah dengan mengikuti arahan dan kebijakan dari Pemkab, terlebih dari itu Desa Jatimulyo mempercayakan semuanya kepada Pemkab. Desa Jatimulyo disini tinggal memanfaatkan program dari pemerintah, dengan mengikuti program dari pemerintah sudah menilai bahwasannya Pemkab dan *Combine Resource Institution* ini sudah membangun kepercayaan dengan baik, maka setiap desa di kabupaten bantul terutama Desa Jatimulyo tinggal melakukan dan memanfaatkannya. Desa Jatimulyo ini percaya selama program Sistem Informasi Desa memiliki perjanjian kerjasama yang sah dan dapat disepkati oleh semua pihak-pihak yang terlibat, maka akan mengikuti sesuai arahan dan kebijakan dari Pemkab.

Dari pemaparan diatas dalam membangun kepercayaan antara Pemkab dengan *Combine Resource Institution* ini sudah berjalan dengan baik karena dari hasil penelitian awal mula program ini dari desa serta dibantu oleh pihak swasta yaitu *Combine Resource Institution* maka dari

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mempercayai program ini dan sebelum diimplementasikan diseluruh desa di Bantul program ini sudah dijalankan disalah satu desa di klaten dan sudah terbukti program Sistem Informasi Desa ini sudah layak dan mempunyai manfaat yang banyak.

c. Komitmen terhadap Proses (*Comitment to Process*)

Komitmen terhadap proses kolaborasi sangatlah penting dalam menjalankan program. Karena komitmen akan menentukan keberhasilan atau kegalalan suatu kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, Komitmen berkaitan dengan motivasi individu atau kelompok dalam berpartisipasi untuk merumuskan maupun menjalankan program baersama dalam mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Komitmen ini berawal pada penyusunan perumusan kebijakan atau program secara bersama-sama oleh semua pihak-pihak yang terlibat kolaborasi serta dapat disetujui oleh bersama dengan bisa menampung seluruh masukan dan saran juga bisa menyaringnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Komitmen yang dilaksanakan oleh pemkab dengan *Combine Resource Institution* berawal pada penyusunan perjanjian bersama pada tahun 2013 oleh pemkab melalui Kantor Pengolahan Data Telematika serta *Combine Resource Institution*. Dimana dalam perjanjian tersebut telah menjelaskan tujuan dan aturan-aturan selama program Sistem Informasi Desa ini berlangsung. Tetapi dalam realitanya perjanjian kerjasama ini berlaku hanya satu tahun saja, meskipun seperti itu

pemkab dengan *Combine Resource Institution* tetap memiliki keterikatan, seperti yang disampaikan oleh bapak M.Amrun sebagai Unit Pelayanan

Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution* bahwa :

“nah soal perjanjian kerjasama sebenarnya itu dari *Combine Resource Institution* fleksibel, walaupun itu perjanjian kerjasamanya hanya satu tahun tetapkan kebutuhan untuk implementasi penerapan bisa diperpanjang. Apalagi SID ini tidak berhenti dipengembangannya karena menerapkan programnya dari versi 2.0 dan pada akhir tahun ini akan rilis 3.10” (Senin, 13 November 2017)

Seperti yang telah diungkapkan oleh M.Amrun sampai saat ini belum membuat pembaharuan untuk perjanjian kerjasama antara pemkab dan *Combine Resource Institution*. Meskipun seperti itu kolaborasi ini akan tetap berjalan hanya tinggal memperbaharui dan memaksimalkan sinergitas diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Komitmen yang dilaksanakan oleh pemkab dengan *Combine Resource Institution* berupa perjanjian kerjasama, selain itu belum ada aturan lain dalam program Sistem Informasi Desa. Karena komitmen yang dilaksanakan adalah dari pihak kesatu dan kedua maka untuk Desa Jatimulyo yang mengikuti program dari pemerintah ini tentu akan mengikuti arah dan kebijakan dari pemerintah kabupaten.

Dari pemaparan diatas bahwasanya komitmen terhadap proses ini dijalankan sesuai aturan-aturan yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama komitmen yang dijalankan sudah baik dan menjadi legal serta mematuhi aturan, selain dengan adanya perjanjian kerjasama komitmen

tidak hanya pada acuan aturan saja tetapi dari individu masing-masing sudah memiliki keterkaitan masing-masing.

d. Sikap Saling Memahami (*Share Understanding*)

Share understanding yang berarti sikap saling memahami, dalam kolaborasi sikap memahami ini yaitu untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama oleh setiap aktor yang terlibat dalam proses program Sistem Informasi Desa, atau bahkan dapat di artikan sebagai kesepakatan bersama mengenai pengetahuan yang relevan serta diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dalam *share understanding* komunikasi sangat dipenting untuk dijaga antara pihak-pihak yang terkait dalam proses kolaborasi. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik maka pihak-pihak yang terlibat akan berbagi pengetahuan dalam mengatasi berbagai permasalahan. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak M.Amrun sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas Di *Combine Resource Institution*, dalam program Sistem Informasi Desa sikap saling memahami ini terjadi ketika Pemkab dan *Combine Resource Institution* sudah membuat perjanjian kerjasama, tetapi pada kenyataannya dari pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program Sistem Informasi Desa dari awal perjanjian kerjasama baru tiga kali melaksanakan pelatihan. Untuk desa yang merasa kurang dalam menjalankan programnya akan secara mandiri mendatangi *Combine Resource Institution* untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh desa.

Tetapi untuk Desa Jatimulyo tidak termasuk salah satu desa yang secara mandiri mendatangi *Combine Resource Institution* untuk melakukan pelatihan. Desa Jatimulyo ini hanya akan mengikuti arahan dari pemerintah kabupaten saja. Meskipun seperti itu dari pihak Pemkab memahami karena ada beberapa alasan yang dimiliki pemerintah desanya juga seperti yang dikatakan oleh bapak M. Amrun sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas bahwa :

“dari *Combine Resource Institution* melayani mereka, kebutuhan system ini bukan kebutuhan dari kita yang di *Combine* tapi kebutuhan ini merupakan kebutuhan desa” (Senin, 13 November 2017)

Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwasanya dari pihak *Combine* menerima pelatihan mandiri yang diinginkan dari desa tetapi harus membuat laporan kepada Pemkab. Sikap saling memahami ini terjalin ketika pihak yang bersangkutan memahami kondisi desa-desa yang menginginkan pelatihan, selain itu juga memahami bahwasanya Pemkab belum bisa memberikan pelatihan secara *intensif*. Untuk Desa Jatimulyo dari dilaksanakannya program sampai pada saat ini baru melaksanakan dua kali pelatihan yang secara terundang dari pemerintah kabupaten.

Sampai saat ini dari Pemkab melalui Diskominfo bersama *Combine Resource Institution* melakukan pelatihan baru tiga kali, maka dari itu dari Pemkab mengerti ketika desa-desa yang belum memanfaatkan dengan baik program Sistem Informasi Desa ini termasuk Desa Jatimulyo yang memiliki beberapa kendala dalam menjalankan

programnya, juga pihak *Combine Resource Institution* mengerti ketika desas ecara mandiri mendatanginya ingin melakukan pelatihan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sikap saling memahami ini terjadi ketika setelah diimplementasikan program Sistem Informasi Desa di seluruh desa di Kabupaten Bantul tidak merata, dimana hanya desa yang tertarik program Sistem Informasi Desa yang bisa memanfaatkan. Maka dari itu dari pihak Pemkab melalui Diskominfo mengerti dengan kondisi desa yang tidak memanfaatkan program Sistem Informasi Desa termasuk Desa Jatimulyo. Tetapi dalam hal ini desa yang ingin mengembangkan program Sistem Informasi Desa secara mandiri menghadiri *Combie Resource Institution* untuk melakukan pelatihan mandiri. Dari *Combie Resource Institution* juga memahami kondisi seperti ini, dan membuka lebar kepada desa-desa yang ingin melaksanakan pelatihan secara mandiri dengan syarat membuat laporan kepada Pemkab.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara merupakan suatu bentuk hasil yang dilaksanakan dalam prooses kolaborasi yang menampilkan *output* atau keluaran yang nyata, akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Dalam proses *intermediate outcome* tidak dapat digeneralisir sebagai hasil yang dicapai.

Hasil sementara dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan dari tahun 2013 sampai saat ini masih kurang efektif. Kembali lagi karena inovasi program ini berawal dari desa, jadi tingkat keberhasilannya pun tidak merata seperti yang di sampaikan oleh bapak M.Amrun sebagai Unit Pelayanan Sumber Daya Komunitas di *Combine Resource Institution* adalah :

“Meskipun diseluruh desa di Kabupaten Bantul sudah mengimplementasikan program SID tetapi untuk keberhasilannya tidak merata karena kembali lagi ke desa, ini bukan kebutuhan *combine* juga buka kebutuhan pemkab tetapi ini adalah kebutuhan desa” (Senim, 13 November 2017)

Dari pernyataan diatas bahwa melihat hasil sementara sampai saat ini masih belum merata, dari 75 desa di Kabupaten Bantul hanya 16 desa yang baru memanfaatkannya, tidak termasuk Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo memiliki beberapa kendala dalam menjalankan Sistem Informasi Desa kendala yang terjadi adalah dari sarana prasarana yang kurang mendukung, sumber daya manusia yang kurang dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya (*Intermediate Outcome*) atau hasil sementara sampai saat ini dalam proses kolaborasi untuk program Sistem Informasi Desa belum berjalan secara maksimaal serta dalam pelaksanaannya tidak semua desa memanfaatkan program Sistem Informasi Desa yang memanfaatkan hanya desa-desa yang tertarik dalam program Sistem Informasi Desa tidak termasuk Desa Jatimulyo. Dari 75 Desa yang

mengimplementasikan program Sistem Informasi Desa baru 16 yang bisa memanfaatkan programnya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution*

Pelaksanaan *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* tentu mempunyai beberapa faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses *Collaborative Governance*. Maka dari itu faktor-faktor ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam program Sistem Informasi Desa adalah :

a) Sumber Daya

Factor pendukung dalam *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam kolaborasi ini sangat diperlukan karena disetiap aktor yang terlibat dalam program ini sudah mempunyai tugas masing-masing dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi sumber daya manusia disetiap pihak yang terlibat dalam menjalankan programnya yang menjalankan program

Sistem Informasi Desanya dan keberhasilan program ini mengacu kesadaran masing-masing sumber daya manusia dalam pemanfaatan maupun peningkatan program.

b) Otoritas

Otoritas atau kewenangan merupakan sebuah factor yang mendukung kolaborasi. Dengan adanya otoritas atau kewenangan yang diberikan setiap stakeholders maka stakeholder lain bisa menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing baik itu melalui sebuah prosedur atau pemberian kebebasan berinovasi.

Dari pemaparan diatas bahwa faktor pendukung dalam keberhasilan program adalah dari sumber daya manusia dan otoritas, program ini terpusat ke desa maka keberhasilan program ini bisa dilihat sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan programnya, untuk Desa Jatimulyo karena mempunyai beberapa kendala termasuk sumber daya manusia yang kurang memahami teknologi informasi jadi programnya belum berjalan, serta di Desa Jatimulyo karena diberikan kewenangan yang bebas dan kurangnya koordinasi serta pantauan dari Pemkab maka program Sistem Informasi Desa tidak diprioritaskan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat bisa membuat suatu program kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam *Collaborative Governance* ini adalah :

a) Kurang Komitmen

Komitmen merupakan faktor penting dalam kolaborasi. Tanpa ada komitmen dari masing-masing *stakeholders*, kolaborasi tidak akan berjalan dan bisa mencapai dari tujuan kolaborasi. Kolaborasi dalam program Sistem Informasi Desa ini, komitmen masing-masing *stakeholders* masih kurang sehingga kolaborasi tidak bisa berjalan baik bahkan melakukan pelatihan pada tahun 2016 baru melaksanakan dua kali pelatihan saja.

b) Kurang Koordinasi

Dalam kolaborasi ini, kurang adanya koordinasi yang baik antara *stakeholders*. Dalam kurun waktu satu tahun saja belum pernah melaksanakan pertemuan formal yang benar-benar membahas mengenai bagaimana program Sistem Informasi Desa ini bisa berjalan dengan baik serta bisa merata diseluruh desa di Kabupaten Bantul.

c) Sumber Daya Manusia kurang memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam proses kolaborasi yang menjalankan pemanfaatan *e-government* ini tentu sumber daya manusia dituntut untuk bisa menjalankan suatu programnya ditingkat desa, tetapi untuk hal ini masih banyak perangkat desa yang belum bisa menggunakan program Sistem Informasi Desa termasuk Desa Jatimulyo permasalahan dasarnya adalah belum adanya sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dan komunikasi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam *Colaborative Governance* ini mempunyai tiga hal yaitu dari kurangnya komitmen yang dijalankan, kurangnya koordinasi antar stakeholders, serta kurangnya sumber daya manusia yang belum bisa menjalankan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat Desa. Inilah yang menyebabkan mengapa Desa Jatimulyo belum menjalankan program Sistem Informasi Desa dengan benar.